

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, perubahan struktur ekonomi, serta perbaikan kondisi sosial. Proses pembangunan melibatkan berbagai sektor, seperti industri, pertanian, dan jasa yang saling mendukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan ekonomi umumnya ditunjukkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, di tengah upaya pembangunan tersebut, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi banyak negara. Permasalahan kemiskinan timbul karena adanya sebagian orang yang belum mampu mengelola kehidupannya hingga mencapai taraf kehidupan yang layak (Ristika et al., 2021). Kemiskinan dapat menghambat pembangunan karena berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta berkurangnya kesempatan ekonomi yang dimiliki masyarakat.

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia turut berkomitmen dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs bertujuan untuk mencapai target universal bersama yang berfokus pada aspek pembangunan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial (Adhitya et al., 2022). Salah satu agenda utama dalam SDGs adalah pengentasan kemiskinan yang tercantum pada tujuan pertama, yaitu *No Poverty*,

yang menargetkan pengurangan kemiskinan ekstrem hingga tahun 2030. Oleh karena itu, upaya memahami berbagai faktor yang memengaruhi kemiskinan menjadi penting untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Amartya Sen dalam Todaro dan Smith (2011), kemiskinan tidak hanya tentang keterbatasan pendapatan, tetapi juga keterbatasan kapabilitas individu untuk mencapai kehidupan yang layak. Konsep kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen menekankan pentingnya kebebasan individu dalam menentukan dan mewujudkan pilihan hidup yang bernilai bagi dirinya. Kapabilitas dipandang sebagai elemen esensial dalam kehidupan manusia, karena semakin luas kapabilitas yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kebebasannya dalam memanfaatkan peluang yang tersedia. Selain itu, kapabilitas juga berperan dalam mendorong perubahan sosial dan ekonomi, sebab keterbatasan kapabilitas inilah yang menjadi akar terjadinya kemiskinan.

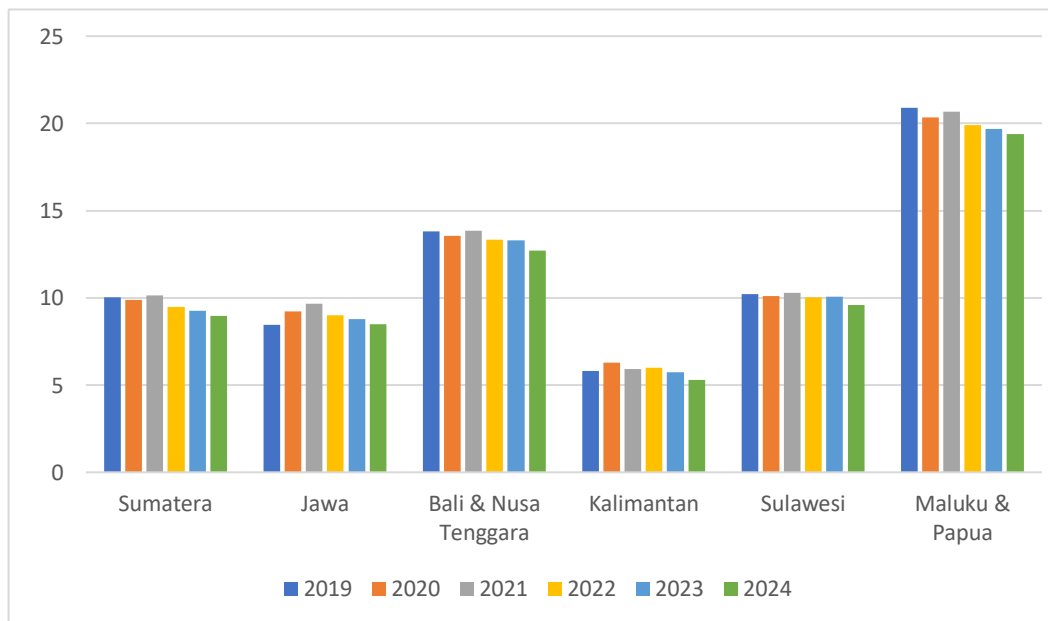
Dalam teori kapabilitas, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan individu dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta berbagai fasilitas pendukung kehidupan lainnya. Seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi dirinya dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi maupun sosial. Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap peluang dan sumber daya dapat menyebabkan individu sulit meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mendorong terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan tidak hanya melalui

peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui upaya memperluas akses dan kesempatan masyarakat agar kapabilitas yang dimiliki dapat berkembang secara optimal.

Sejalan dengan komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs), Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam mengatasi kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta penduduk. Kemiskinan tidak hanya ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, perumahan yang layak, serta kesempatan kerja yang produktif (Hayat & Jadid, 2025). Oleh karena itu, kemiskinan sering dijadikan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus diupayakan, penurunan kemiskinan tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, terutama pada wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang beragam.

Periode 2019-2024 menjadi fase penting dalam dinamika kemiskinan di Indonesia karena mencakup kondisi sebelum pandemi Covid-19, masa pandemi, dan periode pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pandemi Covid-19 memberikan tekanan besar terhadap perekonomian nasional akibat terganggunya aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Menurut Rahmadia (2020), dampak terbesarnya terjadi pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat tingkat penularan virus yang memengaruhi aspek fundamental aktivitas manusia. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja, kenaikan

tingkat pengangguran terbuka, serta penurunan pendapatan rumah tangga yang mendorong peningkatan kemiskinan. Namun, proses pemulihan ekonomi pasca pandemi tidak berlangsung secara merata di setiap daerah karena perbedaan struktur ekonomi, kondisi tenaga kerja, dan tingkat pembangunan wilayah. Kondisi ekonomi yang berbeda antar daerah pasca pandemi membuat setiap daerah memiliki tingkat kerawanan ekonomi masing-masing (Deviana & Putro, 2023). Berikut gambaran perkembangan tingkat kemiskinan antar pulau di Indonesia periode 2019-2024 dalam grafik.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Antar Pulau di Indonesia 2019-2024 (%)

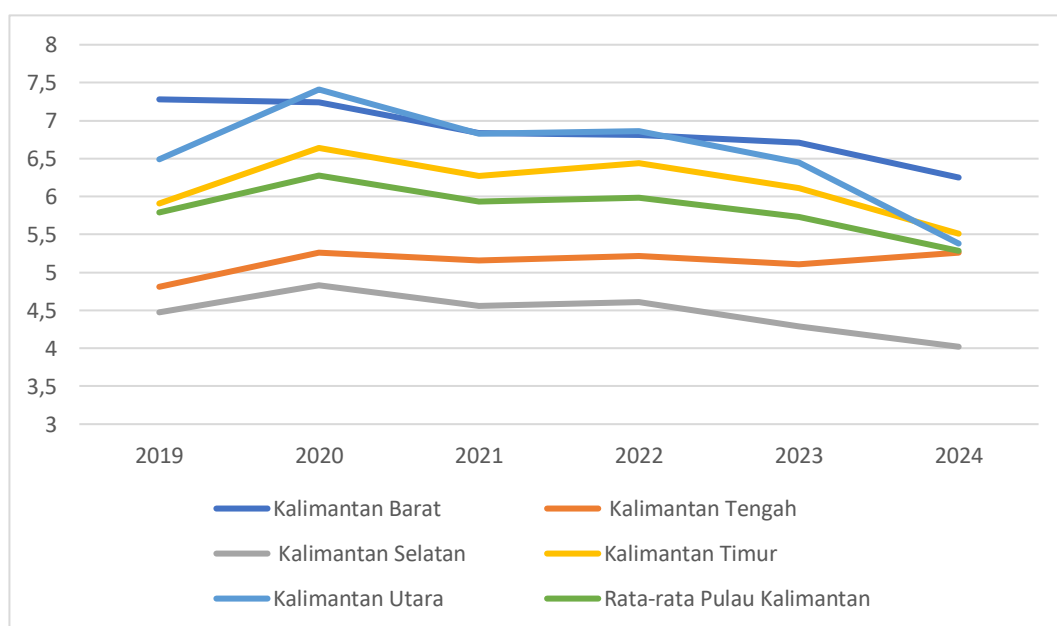
Berdasarkan gambar diatas, kemiskinan antar pulau di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan yang cukup nyata antar wilayahnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan tertinggi masih berada di kawasan Indonesia Timur, khususnya Pulau Maluku dan Papua yang mencapai sekitar 19,39%, sehingga menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih menghadapi

tantangan besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Pulau Sulawesi mencatat tingkat kemiskinan sekitar 10%, kemudian Pulau Sumatera berada pada kisaran sekitar 8-9%, dan Pulau Jawa sekitar 8,05%. Meskipun Pulau Jawa memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah dibandingkan kawasan Indonesia Timur, pulau ini tetap menyumbang jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia karena jumlah penduduknya yang sangat besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan ekonomi di Indonesia terus mengalami perkembangan, distribusi kesejahteraan masyarakat antar pulau masih belum sepenuhnya merata.

Berbeda dengan pulau-pulau tersebut, Pulau Kalimantan justru mencatat tingkat kemiskinan paling rendah di Indonesia, yaitu sekitar 5,44%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia, serta cenderung stabil terhadap guncangan ekonomi, termasuk pada masa pandemi Covid-19, yang ditandai dengan tidak adanya lonjakan signifikan angka kemiskinan. Stabilitas ini berbeda dengan Pulau Jawa yang sempat mengalami peningkatan kemiskinan akibat perlambatan aktivitas ekonomi dan pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi.

Di sisi lain, Kalimantan memiliki karakteristik wilayah yang unik dalam konteks pembangunan ekonomi, dengan kekayaan sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan, serta peran strategis dalam pembangunan nasional melalui penetapan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Namun, di balik potensi tersebut, masih terdapat perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah di

dalam Kalimantan. Perbedaan karakteristik ekonomi daerah, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan akses pembangunan menyebabkan tingkat kemiskinan tidak sepenuhnya merata, sehingga rendahnya rata-rata kemiskinan di tingkat pulau belum tentu mencerminkan kondisi kesejahteraan yang sama di seluruh daerah. Berikut tingkat kemiskinan antar provinsi di Pulau Kalimantan.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Kalimantan 2019-2024 (%)

Berdasarkan gambar tingkat kemiskinan di lima provinsi Pulau Kalimantan pada periode 2019-2024, terlihat adanya kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di sebagian besar wilayah, meskipun pada beberapa tahun tertentu masih terjadi fluktuasi. Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren penurunan dari 7,28 persen pada tahun 2019 menjadi 6,25 persen pada tahun 2024. Pola penurunan juga terlihat di Kalimantan Selatan yang turun dari 4,47 persen pada tahun 2019 menjadi 4,02 persen pada tahun 2024, serta Kalimantan Utara yang menurun dari 6,49 persen menjadi 5,38 persen pada periode yang sama. Sementara

itu, Kalimantan Timur mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga mencapai 6,64 persen sebelum kembali menurun menjadi 5,51 persen pada tahun 2024. Berbeda dengan provinsi lainnya, tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah cenderung mengalami fluktuasi, dari 4,81 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 5,26 persen pada tahun 2020, kemudian mengalami perubahan yang relatif tidak stabil hingga kembali berada pada angka 5,26 persen pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara umum terjadi penurunan tingkat kemiskinan, dinamika perubahan di setiap provinsi masih berbeda-beda. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara agregat tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan cenderung lebih baik. Namun demikian, rendahnya tingkat kemiskinan pada tingkat pulau tidak semata-merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayahnya. Beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah, sementara provinsi lain seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara masih menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketimpangan kondisi sosial ekonomi antar wilayah yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan struktur ekonomi daerah, tingkat pembangunan, serta akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya ekonomi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pulau Kalimantan memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah di Indonesia, ketimpangan antar provinsi masih terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan belum merata di seluruh wilayah. Perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi mencerminkan variasi karakteristik ekonomi dan dinamika

pembangunan di tiap daerah. Oleh karena itu, Kalimantan menjadi menarik untuk dikaji karena selain memiliki tingkat kemiskinan rendah, juga menunjukkan perbedaan kesejahteraan antarwilayah.

Selain dinamika pasca pandemi, Kalimantan juga mengalami transformasi struktural melalui perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Kebijakan ini berdampak pada percepatan pembangunan infrastruktur, ekonomi, serta memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi provinsi lain melalui peningkatan konektivitas, investasi, dan sektor logistik. Perpindahan ibu kota diharapkan dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan secara ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya, serta memastikan masyarakat lokal tidak terpinggirkan sehingga dampaknya lebih merata dan berkelanjutan (Armi & Lessy, 2024). Namun, pembangunan berskala besar juga berpotensi menimbulkan ketimpangan baru jika manfaatnya tidak terdistribusi secara merata.

Dalam menganalisis dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan indikator headcount index (P0) sebagai ukuran utama. P0 menunjukkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan sehingga mampu menggambarkan proporsi penduduk miskin secara langsung. Indikator ini dipilih karena lebih relevan untuk melihat dampak umum pembangunan, investasi, dan perubahan struktur ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin, dibandingkan P1 dan P2 yang lebih menekankan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu, P0 dianggap paling sesuai dalam penelitian ini. Fenomena ini penting dikaji lebih lanjut sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Di tengah dinamika pembangunan, zakat, infaq, dan sedekah menjadi instrumen penting untuk dikaji karena berperan sebagai dana potensial dalam penanggulangan kemiskinan (Jacob et al., 2024). Dalam perspektif teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan kebebasan dan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjalani kehidupan yang layak. Oleh karena itu, distribusi zakat dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memberikan jaminan keamanan ekonomi (*economic security*) bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dalam beberapa tahun terakhir, penghimpunan dana ZIS menunjukkan pola yang berfluktuasi, Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan nilai ZIS tertinggi yang mencapai sekitar Rp74 miliar pada tahun 2024, sedangkan Kalimantan Tengah memiliki nilai terendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ZIS di Pulau Kalimantan cukup besar dan terus berkembang, namun kapasitas penghimpunan dan penyalurannya masih berbeda antarprovinsi sehingga optimalisasi pengelolaan dana ZIS masih diperlukan.

Pandangan mengenai pentingnya distribusi kekayaan dalam masyarakat juga telah dijelaskan oleh Ibn Khaldun dalam kitab *Al-Muqaddimah*. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa kesejahteraan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh sirkulasi kekayaan yang merata di antara masyarakat. Apabila kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu, maka akan menimbulkan kesenjangan sosial dan memperlemah aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Sejalan dengan pandangan tersebut, penyaluran zakat, infaq, dan sedekah memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan melalui mekanisme redistribusi pendapatan dari

kelompok masyarakat yang mampu kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Penelitian Beik dan Pratama (2016) menunjukkan bahwa zakat yang disalurkan secara produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik serta menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, terdapat paradoks yang menarik untuk dikaji, yaitu tingginya penghimpunan ZIS di beberapa provinsi belum selalu diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan yang sebanding. Sebagai contoh, Kalimantan Timur memiliki nilai ZIS tertinggi selama periode penelitian, tetapi tingkat kemiskinannya masih lebih tinggi dibanding Kalimantan Selatan yang memiliki tingkat kemiskinan terendah. Menurut Nur Aisyah (2023), apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini berimbas pada peningkatan penerimaan zakat dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, efektivitas ZIS dalam menurunkan tingkat kemiskinan masih memerlukan pengujian empiris yang lebih mendalam, khususnya pada wilayah dengan karakteristik ekonomi dan sosial yang beragam seperti Pulau Kalimantan, sehingga penggunaan variabel ZIS menjadi kebaruan dalam penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada faktor ekonomi konvensional.

Disisi lain, kondisi pasar tenaga kerja dan tingkat pengangguran merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan (Rofik, 2018). Pengangguran terjadi ketika pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan, konsumsi, dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kalimantan Timur menjadi provinsi

dengan tingkat pengangguran tertinggi, mencapai 6,81 persen pada tahun 2021, sedangkan Kalimantan Tengah cenderung memiliki tingkat pengangguran terendah. Kondisi tersebut mencerminkan perbedaan kondisi pasar tenaga kerja antarprovinsi yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, serta kemampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja, termasuk akibat dampak pandemi Covid-19 dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun berbagai proyek pembangunan telah membuka peluang kerja baru, kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja.

Menurut Amartya Sen dalam *Development as Freedom* (1999), pengangguran berkontribusi langsung terhadap peningkatan angka kemiskinan karena banyak individu kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi yang stabil. Tingginya pengangguran mencerminkan rendahnya permintaan tenaga kerja yang dapat disebabkan oleh stagnasi sektor riil, rendahnya investasi, maupun ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Namun, terdapat paradoks yang menarik pada Pulau Kalimantan, yaitu beberapa provinsi dengan tingkat pengangguran relatif tinggi tidak selalu memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Sebagai contoh, Kalimantan Timur mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi selama periode penelitian, tetapi tingkat kemiskinannya relatif lebih rendah dibanding beberapa provinsi lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor-sektor padat modal, seperti pertambangan dan industri ekstraktif, belum sepenuhnya mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat. Akibatnya, manfaat pertumbuhan

ekonomi tidak selalu dirasakan secara merata, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka tetap menjadi variabel penting dalam menjelaskan dinamika kemiskinan di Pulau Kalimantan.

Faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan adalah ketimpangan pendapatan (Safitri & Susilo, 2024). Ketimpangan pendapatan mencerminkan belum meratanya distribusi hasil pembangunan yang diterima oleh masyarakat. Kondisi ini sering terjadi pada wilayah yang memiliki perbedaan tingkat pembangunan, aktivitas ekonomi, dan akses terhadap sumber daya antar daerah. Namun demikian, kondisi berbeda terjadi di Kalimantan Selatan yang tercatat memiliki tingkat ketimpangan tertinggi sebesar 0,351 pada tahun 2020 yang dimana Kalimantan Selatan merupakan Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan terendah dalam periode 2019-2024, sedangkan Kalimantan Utara menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif lebih rendah namun memiliki Tingkat Kemiskinan tertinggi. Meskipun demikian, perbedaan tingkat ketimpangan antarprovinsi menunjukkan bahwa pemerataan hasil pembangunan di Pulau Kalimantan masih belum sepenuhnya tercapai.

Menurut Amartya Sen, ketimpangan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapatan, tetapi juga menyangkut ketimpangan kapabilitas individu dalam memperoleh berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Ketika sebagian masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan, kesehatan, modal usaha, dan kesempatan ekonomi, sementara kelompok lainnya memiliki akses yang terbatas, maka manfaat pembangunan tidak dapat dirasakan secara merata. Menariknya, terdapat fenomena bahwa penurunan tingkat

ketimpangan di beberapa provinsi tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan yang sama besarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan distribusi pendapatan belum tentu secara langsung mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, masih terdapat kelompok penduduk yang meskipun hidup dalam kondisi distribusi pendapatan yang lebih merata, tetap menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan menjadi variabel yang penting untuk dianalisis dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di Pulau Kalimantan. Hasil penelitian Safitri dan Susilo (2024) juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Selain faktor ekonomi dan sosial, ketersediaan infrastruktur dasar juga menjadi salah satu aspek yang memengaruhi tingkat kemiskinan suatu wilayah. Infrastruktur seperti transportasi, energi, komunikasi, serta fasilitas publik lainnya berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat (Aulia, 2025). Namun, masih terdapat beberapa wilayah di Pulau Kalimantan, terutama daerah pedalaman dan kawasan yang sulit dijangkau, yang menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar. Kondisi tersebut dapat menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, informasi, dan kegiatan ekonomi produktif. Berdasarkan data pembangunan infrastruktur listrik di lima provinsi Pulau Kalimantan periode 2019-2024, akses listrik menunjukkan tren yang terus meningkat. Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan tingkat akses listrik tertinggi yang hampir mencapai 100 persen pada tahun 2024. Sementara itu, Kalimantan Barat yang pada awal periode penelitian memiliki

tingkat akses listrik relatif lebih rendah juga mengalami peningkatan hingga mencapai 99,08 persen pada tahun 2024. Secara umum, perkembangan ini menunjukkan bahwa pemerataan akses listrik di Pulau Kalimantan semakin baik dari tahun ke tahun.

Dalam perspektif teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen, pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memiliki kebebasan dan kemampuan (*capabilities*) untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Infrastruktur yang memadai dapat memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan, mengakses layanan kesehatan, mengembangkan usaha, serta memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Meskipun demikian, peningkatan akses listrik yang hampir merata di seluruh provinsi Kalimantan belum sepenuhnya diikuti oleh hilangnya kemiskinan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur saja belum tentu mampu memberikan dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan ekonomi yang memadai. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Aziz et al., (2025) menyebutkan bahwa infrastruktur dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas, serta memperluas peluang kerja.

Pemilihan periode penelitian tahun 2019-2024 dilakukan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan di Pulau Kalimantan secara lebih menyeluruh, mulai dari periode sebelum pandemi Covid-19, saat terjadinya guncangan ekonomi

akibat pandemi, hingga masa pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan setelah ditetapkan Kalimantan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, Pulau Kalimantan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia, baik dari sisi struktur ekonomi, kondisi geografis, maupun pasar tenaga kerja. Di sisi lain, sejak tahun 2020 pengelolaan zakat juga mengalami perkembangan melalui digitalisasi pembayaran zakat yang semakin luas. Namun, penelitian yang mengkaji pengaruh zakat, infaq, dan sedekah bersama dengan tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, dan infrastruktur terhadap kemiskinan di Pulau Kalimantan masih relatif terbatas.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan variabel zakat, infaq, dan sedekah, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, dan infrastruktur dalam satu model analisis untuk menjelaskan tingkat kemiskinan di Pulau Kalimantan. Penelitian ini juga mempertimbangkan perkembangan digitalisasi pengelolaan zakat serta peran infrastruktur sebagai sarana yang dapat memperluas kesempatan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif di Pulau Kalimantan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh zakat, infaq, dan sedekah, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, dan infrastruktur secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Kalimantan selama periode 2019-2024?
2. Bagaimana pengaruh zakat, infaq, dan sedekah, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, dan infrastruktur secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Kalimantan selama periode 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh zakat infaq sedekah, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan dan infrastruktur secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Kalimantan selama periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh zakat infaq sedekah, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan dan infrastruktur secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Kalimantan selama periode 2019-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan dan ekonomi Islam, dengan memperkaya kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat

bukti empiris mengenai peran zakat infaq sedekah sebagai instrumen distribusi pendapatan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, khususnya pada wilayah dengan karakteristik ekonomi dan geografis yang spesifik seperti Pulau Kalimantan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran ZIS agar lebih optimal dan merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, khususnya di Pulau Kalimantan. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dasar pengembangan penelitian terkait kemiskinan dan instrumen ekonomi Islam di masa mendatang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkup Pulau Kalimantan yang terdiri dari 5 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur. Penulis melakukan penelitian dengan data sekunder yaitu dengan menggali informasi melalui *website* resmi dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester genap pada tahun ajaran 2025/2026, dimulai sejak bulan Januari 2026 dengan pengajuan judul kepada pihak Fakultas

[illegible]